

ISSN 1829-8001

Terakreditasi Nomor: 10/E/KPT/2019



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.16, No.1, Juni 2019

DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019

- Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019
- Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik 'Emak-Emak dan Ibu Bangsa' Pada Pemilu 2019
- Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019
- Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019
- Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
- Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren

REVIEW BUKU

- Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi

Jurnal Penelitian
Politik

Vol. 16

No. 1

Hlm. 1-110

Jakarta,
Juni 2019

ISSN
1829-8001



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, M.A. (*Ahli Gender dan Politik*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Sutan Sorik, SH

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Terakreditasi Kemeristek Dikti Nomor 10/E/KPT/2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019 Efriza	1–15
• Upaya Mobilisasi Perempuan melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019 Luky Sandra Amalia	17–33
• Netralitas Polri menjelang Pemilu Serentak 2019 Sarah Nuraini Siregar	35–46
• Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019 Defbry Margiansyah	47–68
• Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 R. Siti Zuhro	69–81
• Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren Dhurorudin Mashad	83–99
Review Buku	
• Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi Sutan Sorik	101–107
Tentang Penulis	109–110

CATATAN REDAKSI

Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg). Oleh karena itu, menarik untuk melihat dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu 2019.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan 6 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama yang ditulis oleh Efriza, “Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019,” mencoba menjelaskan mengenai dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjelaskan upaya koalisi dalam pemilu serentak 2019. Tulisan ini juga membahas mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai. Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya *coattail effect*, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya. Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif.

Artikel berikutnya, “Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak Dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019”. Artikel yang ditulis oleh Luky Sandra Amalia ini membahas upaya mobilisasi suara perempuan dilakukan melalui penyematkan label ‘emak-emak’ dan ‘ibu bangsa’. Emak-emak adalah

sebutan bagi perempuan pendukung paslon penantang sedangkan ibu bangsa merupakan panggilan untuk perempuan yang berada di barisan kubu petahana. Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak maupun ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu capres-cawapres kepada pemilih perempuan hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separoh jumlah pemilih. Tidak ada yang lebih konkrit dari yang lain, kedua istilah tersebut sama-sama mendomestikasi peran perempuan. Melalui label emak-emak maupun ibu bangsa, kedua kubu seolah menegaskan bahwa perempuan harus menjadi ibu/emak yang tugasnya hanya di ranah domestik. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat.

Sementara itu, artikel “Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019” yang ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar menganalisa secara khusus netralitas Polri dalam proses pemilu 2019. Terdapat dua pertimbangan atas ulasan ini. Pertama, karena Polri mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat; termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu 2019. Kedua, karena Polri juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas.” yang ditulis oleh

Fenomena “Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019” ditulis oleh Defbry Margiansyah mencoba menganalisa transformasi dari persaingan populisme di dua pemilu berbeda dan konsekuensi yang ditimbulkan bagi politik elektoral, termasuk elaborasi pola-

pola kerja populisme dalam proses kontestasi politik dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kembalinya politik populisme di Indonesia. Dengan menggunakan konsep populisme secara eklektik dan tesis penyesuaian elit, tulisan ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya diinstrumentalisasi sebagai wahana kepentingan elit dan oligarki penyokong dengan mengesksploitasi berbagai aspek mulai dari identitas primordial, relasi klientalistik, prestasi dan personality kandidat secara pragmatis, tetapi tidak memberikan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik dan pendalaman demokrasi secara substansial kedepannya.

Artikel selanjutnya membahas tentang “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” yang ditulis oleh R. Siti Zuhro yang membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Artikel selanjutnya membahas mengenai “Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar : Dimensi Politik Dalam Sastra Lisan Pesantren” ditulis oleh Dhuroruddin Mashad. Tulisan ini membahas mengenai tradisi lisan pesantren salah satunya Shalawat Badar yang ternyata memperlihatkan karakteristiknya yang beda, yakni tampil kental dengan nuansa politik. Shalawat ini acapkali dijadikan sarana mobilisasi kaum santri dalam berbagai kontestasi politik. Realitas ini menjadi bukti bahwa entitas Shalawat Badar kenyataannya merupakan manifestasi dari relasi antara sastra – agama - politik. Naskah

ini dimaksud untuk melakukan rekonstruksi historis tentang konteks politik ketika Shalawat Badar lahir, menelusuri akar penyebab shalawat ini menjadi kental dengan nuansa politik, serta alasan di balik realitas politik bahwa Shalawat ini akhirnya menjadi dipakai sebagai sarana mobilisasi kaum santri.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, “Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi”. *Review* yang ditulis Sutan Sorik mengulas buku yang ditulis oleh Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef tentang Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Ulasan berfokus pada tiga hal yaitu tentang dinamika pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Indonesia dengan batasan pasca reformasi, baik dari segi aspek normatif maupun empiris, bagaimana desain sistem penyelenggaraan pemilu, serta bagaimana pemecahan dan harapan untuk masa depan demokrasi dan kelembagaan penyelenggara pemilu agar mampu meng-*upgrade* demokrasi yang sedang dibangun. Walaupun ada kritik untuk buku ini tentang belum mengupas persoalan sumber daya manusia (SDM) yang memengaruhi performa lembaga-lembaga yang menjalankan demokrasi dan pemilu, akan tetapi ulasan ini sepakat dengan penulis bahwa masih perlu adanya penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai isu-isu atau dinamika social politik yang terjadi menjelang pemilu 2019. Selamat membaca.

Redaksi

DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019

DEMOCRACY AND THE 2019 ELECTION

R. Siti Zuhro

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Email: rszuhro@gmail.com

Diterima: 26 April 2019; Direvisi: 3 Mei 2019; Disetujui: 25 Juni 2019

Abstract

This paper will discuss the challenges of democratic consolidation in the 2019 presidential election. Developing democracy in Indonesia as shown from this presidential election still experienced problems. Deepening democracy failed to exist due to lack of effective pillars of democracy to support democratic consolidation. The 2019 presidential election has not able to produce a good succession and also that to strengthen public trust. This can be seen from the emergence of social unrest after the announcement of the recapitulation result of presidential election by General Election Commission (KPU). One candidate strongly refused the election result. It is clear that the election unfinished yet. Finally the Constitutional Court (MK) has become a determiner for the final result of this election due to the two candidates claimed as the winner of this presidential election.

Keywords: *Deepening Democracy, Presidetal Election, Politicization of Identity, Effective Government, Trust Building.*

Abstrak

Tulisan ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Kata kunci: Pendalaman Demokrasi, Pemilu Presiden, Politisasi Identitas, Pemerintahan Efektif, Membangun Kepercayaan.

Pendahuluan

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, *head to head*, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga

diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat.

Tulisan ini mencoba melihat demokrasi Indonesia melalui fenomena pilpres 2019 yang merupakan salah satu sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis. Ritual politik lima tahunan tersebut menarik untuk dilihat di tengah tingginya pro-kontra terkait kinerja

pemerintah dan pentingnya semua pihak untuk selalu menjaga stabilitas sosial politik nasional dan keutuhan NKRI. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dampak pilpres yang telah digelar beberapa kali terhadap upaya pendalaman dan konsolidasi demokrasi?

Deepening Democracy dan Tantangannya

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (*political society, economic society, the state, dan civil society*) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.¹

Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.

Demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional.

¹ “A democracy becomes consolidated—that is, it is expected to endure—when political actors accept the legitimacy of democracy and no actor seeks to act outside democratic institutions for both normative and self-interested reasons. In other words, democracy is consolidated when, to use a common phrase, it is “the only game in town,” Yana Gorokhovskaia, “Democratic Consolidation”, <https://www.oxfordbibliographies.com>.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan terobosan penting yang dimaksudkan sebagai upaya pendalaman demokrasi (*deepening democracy*), yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal.

Sementara itu, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arah yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) atau konsolidasi demokrasi. Proses ini krusial karena semua tahapan yang dilalui dalam pilpres akan berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif (*governable*). Secara umum bila demokrasi dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat, suatu sistem politik yang demokratis seharusnya dapat menjamin warga masyarakat yang kurang beruntung melalui setiap kebijakan publiknya.²

Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini pilpres dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu.

Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, *pertama*, pengembangan kelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik dan birokrasi (*state apparatus*). *Kedua*, pengembangan penguatan kapasitas administratif

² D.E Reuschmeyer *et.al.*, *Capitalist Development and Democracy*, (UK: Polity Press, 1992), hlm.41.

– teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk.

Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pilpres langsung menjadi langkah awal bagi penguatan peran masyarakat. Peran ini tentunya harus berkesinambungan sampai terjadinya pergantian pemerintahan. Dengan cara itu, peran masyarakat akan senantiasa mewarnai implementasi program pemerintah, dan sebaliknya pemerintah akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Menurut Migdal (1988), negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Dengan kapasitasnya tersebut negara diharapkan mampu melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur relasi sosial, mengambil sumber daya dan mengelolanya. Selain itu, negara juga harus mampu memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kontrol sosial. Berhasil tidaknya kontrol sosial ini akan mencerminkan kuat tidaknya peran negara. Negara yang kuat, menurut Migdal (1988), adalah yang mampu melakukan ketiga fungsi dasar tersebut.

Argumen Smith (1985) dan Arghiros (2001) menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi telah mendasari perilaku, baik elite maupun masyarakat. Untuk itu, sebagian besar pemilih terlebih dulu perlu memiliki kesadaran dan kematangan politik yang cukup memadai. Dengan cara itu, masyarakat diasumsikan memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihannya berdasarkan rasionalitas politik.

Kondisi politik Indonesia yang sedang dalam proses konsolidasi demokrasi memunculkan pertanyaan, yakni apakah pilpres langsung saat ini relevan dan bermanfaat bagi penguatan

demokratisasi dan penciptaan pemerintahan yang *legitimate* dan efektif? Untuk menjawab hal ini kiranya perlu dipahami bahwa demokratisasi adalah proses yang terus-menerus dan tak boleh henti. Seiring dengan itu, tantangan yang dihadapi sejak penyelenggaraan pilpres langsung yang berupa kecenderungan munculnya kompromi-kompromi kepentingan antara elite penguasa dan elite masyarakat seharusnya dicarikan solusinya agar pemilu di Indonesia bisa memenuhi harapan yang diinginkan. Untuk itu, kiranya perlu dikedepankan kembali tujuan utama pilpres sebagai sarana untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan politik masyarakat.

Partisipasi masyarakat (*political participation*), menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik: apakah hanya sekedar manipulasi, konsultasi, aktif atau sampai tingkat *decision making process*? Diantaranya ketaatan dan kepatuhan hukum (apakah elite dan masyarakat menaati ketentuan-ketentuan aturan yang dijadikan acuan dalam proses politik dan pemerintahan?); Budaya kekerasan (apakah praktek-praktek kekerasan masih mendominasi atau masih terjadi dalam proses politik dan pemerintahan?); Keterbukaan politik (apakah tersedia semua informasi bagi aktifnya masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan?); Toleransi (apakah masyarakat dapat menerima perbedaan pendapat dan siap melakukan konsensus dalam setiap perbedaan); Egalitarianisme (apakah terdapat kesamaan status, kedudukan, hak dan kewajiban masyarakat secara politik atau justru masih banyaknya budaya feodal/patrimonial); Penghormatan terhadap HAM (apakah terdapat budaya yang menghormati hak-hak dasar manusia?).

Tabel 1. Demokrasi Prosedural dan Demokrasi Substantif

Variabel	Ukuran Keberhasilan Formal-Prosedural	Ukuran Keberhasilan Demokrasi yang Substantif-Berkualitas
Partisipasi	Kuantitas dan kualitas pemilih	- Pemilih yang kritis - Tidak ada diskriminasi bagi pemilih - tidak ada partisipasi semu karena mobilisasi dan <i>vote buying</i>
Kompetisi	Jumlah kompetitor dan syarat formal kandidat terpenuhi	- Kualitas kompetisi (jurdil) - Peluang yang sama bagi semua warga untuk dipilih (<i>political equality</i>)
Civil Liberties	Secara formal diakui	Tidak ada pembajakan hak-hak politik warga oleh elite
Hasil akhir pemilu	Terpilihnya kepala negara-wakil kepala negara	- Peningkatan kualitas <i>responsiveness</i> dan pertanggungjawaban (<i>accountability</i>) kepala negara pada warga - Mendekatkan pemerintah dengan masyarakat - Meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Sumber: R. Siti Zuhro et al, *Model Demokrasi Lokal*. (Jakarta: PT THC Mandiri, 2011), hlm. 49-50.

Melihat tabel di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa demokrasi Indonesia yang berjalan selama 21 tahun (1998-2019) masih diwarnai prosedural ketimbang substantif. Masalahnya kepastian sosial politik (*social political certainty*) terasa menjauh seiring dengan hadirnya keriuhan, kegaduhan, penistaan agama, isu intoleransi, masalah kebhinekaan yang menimbulkan konflik/sengketa dan silang pendapat serta berita-berita *hoax* yang muncul tanpa henti.

Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Hingga 20 April 2019 Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres/Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, misalnya, secara resmi telah melaporkan sekitar 1.200 daftar sementara kecurangan Pilpres 2019 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal yang sama juga terjadi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin yang juga menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang menguntungkan paslon Prabowo-Sandiaga.³

³ Muhammad Hafid, "BPN Resmi Laporkan 1.200 Dugaan Kecurangan Pilpres 2019", 20 April 2019, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/>, diakses pada 22 April 2019; Redaksi, "TKN Jokowi-Maruf akan Laporkan 14.843 Dugaan Kecurangan yang Untungkan Paslon 02", 2 Mei 2019, <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/02/tnk-jokowi-maruf->

Sulit dinafikan bahwa kompetisi dan kontestasi dalam pilpres melalui kampanye diwarnai oleh tingginya kegaduhan yang terjadi di media massa dan media sosial (medsos). Emosi masyarakat tak jarang ikut terlibat dan mengundang keprihatinan tersendiri karena tidak sedikit di antaranya yang akhirnya harus berurusan dengan hukum. Menkopolhukam, Wiranto, misalnya, menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2018 ada 53 kasus *hoax* (berita bohong) dan 324 *hate speech* (ujaran kebencian) yang terjadi dan sebagian sudah diselesaikan secara hukum.⁴

Selain persoalan hoaks dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Uniknya, kedua belah pihak mengklaim paling mewakili suara umat Islam. Penggunaan politisasi agama dan *character assassination* dalam kampanye semakin mempertajam ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antarsesama anak bangsa. Dampaknya, demokrasi yang

akan-laporkan-14843-dugaan-kecurangan-yang-untungkan-paslon-02, diakses pada 5 Mei 2019.

⁴ Niken Purnamasari, "Wiranto: Ada 53 Kasus Hoax dan 324 Hate Speech Sepanjang 2018", 25 Oktober 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4272642/>, diakses pada 2 Maret 2019.

terbangun menafikan nilai-nilai budaya positif, seperti saling menghargai/menghormati, saling mempercayai dan saling berempati.⁵

Keragaman yang menjadi spirit Bhinneka Tunggal Ika cenderung diabaikan, padahal Indonesia yang berbentuk archipelago, membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik dan kekhasannya sendiri membutuhkan nilai-nilai toleransi, yakni menerima perbedaan, baik agama maupun suku atau etnis (SARA). Berkurangnya nilai-nilai toleransi, khususnya, dalam pemilu telah menimbulkan eksese negatif, seperti kekerasan dan kerusuhan. Berbeda dengan pilpres sebelumnya, sesuai pengumuman pemilu oleh KPU pilpres 2019 diwarnai oleh adanya kerusuhan 22 Mei 2019.⁶ Realitas sosial tersebut jelas tidak hanya mengancam harmoni sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap proses konsolidasi demokrasi.

Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) dan pelebagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.

⁵ Berkenaan dengan *character assassination*, di satu sisi, Jokowi, misalnya, kerap dicap sebagai PKI, lihat: Ihsanuddin, "Presiden: Akhir-akhir Ini Banyak Spanduk Jokowi PKI", 7 Desember 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/07/13292441/presiden-akhir-akhir-ini-banyak-spanduk-jokowi-pki>, diakses pada 2 Maret 2019.

⁶ Patricia Diah Ayu Saraswati, "Live Report: Kerusuhan 22 Mei Usai Pengumuman Pemilu 2019", 22 Mei 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522083812-32-397230/live-report-kerusuhan-22-mei-usai-pengumuman-pemilu-2019>, diakses pada 10 Juni 2019.

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi *test case* penguatan sistem presidensial, pelebagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya *presidential threshold* (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.

Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim

Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi identitas dan agama. Fenomena politisasi identitas dan agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim.⁷ Munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan *ijtima'* ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. hasil *ijtima'*, -yang di dalamnya terdapat representasi ulama sebagai penantang petahana-merekomendasikan Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama (pasangan capres-cawapres bertipe nasionalis-agamis). Dua tokoh seperti Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf

⁷ Politisasi identitas di tataran empirik menunjukkan tarikan isu-isu terkait identitas seperti agama, ras/etnisitas, dan suku ke ranah politik. Khususnya hal ini digunakan dalam pilkada, pemilu presiden dan pemilu legislative untuk mendongkrak elektabilitas.

al-Jufri dan ulama kondang, Ustad Abdul Somad muncul dalam bursa cawapres Prabowo.⁸

Yang menarik hasil ijtima ulama tersebut justru mendapat sanggahan dari kelompok umat Islam lainnya karena dinilai tidak mewakili ulama-ulama lainnya. Sebab, NU, misalnya, tidak merasa turut terlibat dalam ijtima' ulama tersebut. Sebagai contoh, sekitar 400 kiai dan pengurus pesantren seluruh Indonesia menyatakan mendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo/Jokowi-Ma'ruf Amin.⁹ Sebagai "ayah biologis PKB", secara *de facto* pilihan politik NU struktural, khususnya, berada seiring sejalan dengan pilihan politik PKB, yakni menjadi bagian dari koalisi petahana. Hal tersebut bisa dipahami dengan terpilihnya Ma'ruf Amin, ketua MUI dan ketua umum syuriah PBNU, sebagai cawapres Jokowi. Pilihan Jokowi tersebut tidak saja dimaksudkan untuk meraih dukungan umat Islam, tetapi juga sekaligus untuk membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pemerintahannya anti Islam.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, berebut suara muslim merupakan hal yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu. Meskipun dikotomi santri-abangan cenderung makin cair, pendapat tentang pentingnya pasangan calon yang merepresentasikan santri dan abangan masih cukup kuat. Tetapi, hal tersebut tidak dengan sendirinya memberikan jaminan kemenangan. Sejauh ini, dua tokoh utama NU lainnya, yakni Solahuddin Wahid dan Hasyim Muzadi, juga pernah menjadi cawapres dari capres Nasionalis, yakni Wiranto dan Megawati, tetapi keduanya kalah. Lebih dari itu, sejak pemilu 1955 parpol Islam pun belum pernah memperlihatkan dominasi politiknya. Bahkan, suaranya cenderung semakin mengalami penurunan. Jika pada pemilu 1955, gabungan suara parpol Islam mencapai 43,7%,

pada pemilu 2014 suaranya turun menjadi 31.4%.¹⁰ Gambaran tersebut dengan jelas memperlihatkan bahwa dikotomi santri-abangan telah semakin kurang relevan.

Pemilu dan Kegagalan Parpol

Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/evaluasi terhadap pemerintah dan proses *deepening democracy* untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.¹¹ Dalam proses konsolidasi tersebut, parpol sebagai pelaku utama pemilu idealnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Namun, ketika fungsi parpol tidak maksimal, proses konsolidasi demokrasi terhambat. Hal ini tampak jelas dalam pemilu 2019 di mana banyak parpol gagal dalam proses kaderisasi. Hal ini dapat dilihat dari maraknya partai yang memilih mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg. Tujuannya menjadikan selebritis tersebut sebagai *vote getter* partai dalam pemilu.¹² Partai Nasdem, misalnya, tercatat sebagai partai yang paling banyak mengambil artis sebagai calon legislatifnya dalam pemilu 2019.¹³

Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau *platform* politik nasional. Kampanye lebih merupakan pameran pernak-pernik demokrasi ketimbang untuk memetakan dan menjawab persoalan bangsa. Parpol hanya memperdebatkan soal *electoral threshold* sebagai legitimasi kelayakan, namun

⁸ Fathiyah Wardah, "Hasil Ijtima Ulama II Pastikan Dukungan Bagi Prabowo-Sandiaga", 14 September 2018, <https://www.voaindonesia.com/a/hasil-ijtima-ulama-ii-pastikan-dukungan-bagi-prabowo-sandiaga/4571457.html>, diakses pada 2 Maret 2019.

⁹ Nur Habibie, "400 Kiai dan Pengurus Pesantren se-Indonesia Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin", 16 September 2018, <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3644936/400-kiai-dan-pengurus-pesantren-se-indonesia-dukung-jokowi-maruf-amin>, diakses pada 2 Maret 2019.

¹⁰ Abdul Hakim MS, "Sejak Pemilu 1955, Parpol Islam Selalu Kalah Dengan Parpol Nasionalis. Kenapa?", <http://www.skala-surveiindonesia.com/parpol-islam-selalu-kalah-dengan-parpol-nasionalis-kenapa/>, diakses pada 2 Maret 2019.

¹¹ Zuhro, R. Siti, "Demokrasi: Peluang dan Tantangannya", makalah yang dipresentasikan dalam Simposium Doktor dan Guru Besar KAHMI yang diselenggarakan MN KAHMI bekerjasama dengan FISIP Universitas Brawijaya, Malang, 23 Maret 2019.

¹² Ine Yulita Sari, "Ini Dia 54 Artis Nyaleg di Pemilu Legislatif 2019", 21 Juli 2018, <https://www.liputan6.com/pileg/read/3595944/ini-dia-54-artis-nyaleg-di-pemilu-legislatif-2019>, diakses pada 2 Maret 2019.

¹³ Redaksi, "Daftar Caleg dari Kalangan Artis dalam Pemilu 2019, Terbanyak dari Partai Nasdem", 16 April 2019, <http://jatim.tribunnews.com/2019/04/16/daftar-caleg-dari-kalangan-artis-dalam-pemilu-2019-terbanyak-dari-partai-nasdem>, diakses pada 20 April 2019.

minim wacana mengenai ide atau program yang hendak ditawarkan pada rakyat. Perhatian parpol pada rakyat umumnya hanya terjadi pada saat pemilu ketika mereka membutuhkan dukungan suara. Setelah itu, hak dan kedaulatan rakyat tercampakkan.

Dalam perkembangannya aktivitas parpol mewarnai pemerintahan dan parlemen. Perannya cenderung menguat dan berpengaruh signifikan terhadap peta politik Indonesia, meskipun pengaruhnya tidak seluruhnya positif. Contohnya, fragmentasi parpol yang terjadi belakangan ini menyebabkan parpol tidak solid. Jumlah fraksi dari periode ke periode cenderung meningkat. Ironisnya, fragmentasi kepartaian semakin meningkat ketika kebijakan untuk menaikkan *electoral threshold* diterapkan. Padahal, ketika *electoral threshold* dinaikkan, asumsinya jumlah partai semakin sedikit.

Di tataran praksis sebagaimana disebutkan sebelumnya tingkat ketidakpuasan massa terhadap parpol cenderung makin tinggi. Masalahnya, aspirasi dan kepentingan massa tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan publik. Parpol tidak melakukan fungsi intermediasi secara maksimal. Representasi yang seharusnya dilakukan parpol untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi rakyat absen. Parpol juga tampak sibuk dan terjebak dalam pergulatan kepentingannya sendiri dan mengabaikan massa yang menjadi pendukungnya dalam pemilu. Proses pengabaian ini secara lambat tapi pasti telah mendelegitimasi eksistensi parpol.

Bagi massa, parpol gagal melaksanakan peran dan fungsinya dan cenderung menggunakan institusinya hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Absennya beberapa fungsi yang tak dilakukan parpol tersebut membuat kepercayaan rakyat ke parpol menurun drastis. Parpol belum menjadi partai kader, tapi lebih mengandalkan peran ketokohan seorang ketua umum/ketua dewan pembina sebagaimana ditunjukkan selama ini. Di sisi lain, pembenahan partai tampak semakin sulit di tengah maraknya kasus korupsi yang dialami partai atau politisi di parlemen. Upaya untuk menyehatkan politik Indonesia tak kunjung menjadi realita di saat distorsi makin

intensif. Padahal baik dan buruknya parpol akan berpengaruh terhadap penguatan dan peningkatan efektivitas sistem pemerintahan. Bahkan praktik sistem presidensial banyak menghadapi kendala di tengah pelaksanaan sistem multipartai.

Pengalaman dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama: perilaku distortif, melanggar hukum dan menghalalkan semua cara (*vote buying*). Tapi parpol sebagai peserta pemilu belum mampu merespon dan memberi solusi konkrit. Harapan rakyat pasca pemilu, mereka bisa menyaksikan kinerja pemerintah/parlemen yang lebih berpihak pada nasib rakyat. Karena pemilu diharapkan berkorelasi positif terhadap kesejahteraan rakyat.

Pemilu dalam Masyarakat Plural

Mungkin bijak untuk memahami makna demokrasi dalam sebuah negara yang plural dan multikultural seperti Indonesia, dengan mengutip teori etik filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-1804) yang mengingatkan, jika dalam suatu masyarakat majemuk masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut agama, moralitas, atau kulturnya, yang menjadi hasil akhirnya adalah konflik. Dalam konteks Indonesia, kiranya jelas bahwa yang dihadapi tidak hanya kemajemukan etnik dan daerah, tetapi pada saat yang bersamaan adalah 'subbudaya etnik dan daerah' yang majemuk pula.¹⁴

Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. Gambaran tersebut sangat terasa dalam pilpres 2019 di mana masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam. Penggunaan istilah "cebong" sebagai julukan pendukung Jokowi dan "kampret" sebagai julukan pendukung Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Demikian juga dengan penggunaan politisasi identitas (SARA). Sebagai sarana demokrasi rutin lima tahunan, pilpres dan pileg 2019 belum

¹⁴ Uraian mengenai beberapa budaya politik daerah dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerah dapat dilihat dalam Kuntjaraningrat (1983).

disikapi secara positif dengan mengedepankan nilai saling menghargai/menghormati, saling mempercayai dan saling berempati sebagaimana tersirat dalam nilai-nilai Pancasila.

Lepas dari itu, harus diakui juga bahwa pemilu di era reformasi telah memberikan nilai positif. Misalnya, proses liberalisasi politik di era transisi ini tidak hanya membuat proses politik menjadi semakin plural, tetapi juga kompetitif. Setidaknya, hal ini bisa dilihat dalam berbagai arena kontestasi politik. Dalam arena politik kepartaian, hal tersebut bukan hanya terlihat dari tingkat persaingan antarpolitisasi politik dalam pemilu, melainkan juga dari kontestasi antaraktor dalam internal partai yang semakin tajam. Walaupun banyak kritik yang ditujukan pada kompetisi internal partai politik yang masih berkarakter oligarkis, data lain menunjukkan bahwa persaingan terbuka antarpolitisasi untuk merebut jabatan politik strategis dalam partai atau dalam proses rekrutmen anggota legislatif sulit untuk dipungkiri. Situasi kompetitif itu semakin terbuka ketika kerangka regulasi nasional yang mengatur tentang pemilu mengarah pada pemurnian sistem proporsional terbuka, di mana politisi yang terpilih untuk duduk di parlemen adalah politisi yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu.¹⁵

Terbukanya ruang kebebasan membuat politisi bukan satu-satunya aktor yang menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat karena setelah era Reformasi bermunculan lembaga-lembaga pengawas extra parlementer yang juga melibatkan diri dalam fungsi artikulatorik dan pengawasan terhadap pemerintahan. Dengan demikian, proses liberalisasi politik tidak hanya memunculkan CSO, tetapi juga menghadirkan media-media – baik media cetak maupun elektronik – yang semakin bebas dan berani dalam mengawasi

penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran lembaga-lembaga pengawas extra parlementer tersebut menunjukkan bahwa politisi dan partai politik dihadapkan pada tantangan baru, yakni semakin semaraknya ‘kompetitor’ yang terlibat (*engage*) dalam isu-isu *governance*.

Pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Jika legislator terpilih tidak bekerja dengan baik, rakyat akan mempunyai pilihan untuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya. Pemilu juga signifikan untuk lebih mengenalkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang merupakan masyarakat heterogen. Sudah tentu ada sejumlah ruang yang harus diisi untuk perbaikan-perbaikan, namun hal yang pasti adalah demokrasi masih tetap menjadi agenda bangsa ini.

Pemilu dan Politisasi Birokrasi

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Sejauh ini tataran empirik menunjukkan adanya tarikan politik, khususnya, dari penguasa terhadap birokrasi. Hal ini tampak sangat kuat. Salah satunya adalah adanya video viral yang memperlihatkan dugaan dukungan camat se-Makassar kepada paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.¹⁶ Politisasi birokrasi makin tampak nyata dengan diadakannya menteri-menteri, kepala-kepala lembaga, kepala-kepala daerah sebagai pemenang paslon dalam pilpres. Artinya, birokrasi terlibat politik praktis tak hanya di pusat, tapi juga sampai ke daerah-daerah.¹⁷

¹⁵ Selain itu, berlangsung pula perubahan prosedur pengisian anggota DPR/DPD. Bila pemilu terdahulu menggunakan sistem proporsional daftar calon tertutup, pemilu 2004 menggunakan sistem terbuka. Dengan demikian, warga negara yang mempunyai hak pilih dalam pemilu 2004 tidak hanya memilih lambang partai politik, tetapi juga nama calon anggota DPR/DPD. Berbeda dengan sistem pemilihan anggota DPR/DPD, pemilihan DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Dengan kata lain, di masing-masing provinsi warga negara yang memiliki hak pilih bisa memilih secara langsung anggota DPD yang akan mewakili provinsinya.

¹⁶ Redaksi, “Camat di Makassar Dukung Jokowi, Gubernur Sulsel: ASN Harus Netral!”, 22 Februari 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4439492/camat-di-makassar-dukung-jokowi-gubernur-sulsel-asn-harus-netral>, diakses pada 2 Maret 2019.

¹⁷ Redaksi, “Bawaslu: Tren Pelanggaran Pilkada Bukan SARA, tetapi Keterlibatan Pejabat”, 26 Juni 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/26/11363281/bawaslu-tren-pelanggaran-pilkada-bukan-sara-tetapi-keterlibatan-pejabat>,

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi, contoh tersebut menyiratkan pentingnya pembenahan birokrasi. Secara konseptual demokratisasi dan debirokratisasi¹⁸ berjalan seiring dan saling melengkapi. Dengan kata lain, perubahan sistem politik dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi seharusnya mampu mengubah secara signifikan birokrasi, termasuk birokrasi kepemiluan.

Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Persoalannya, bagaimana menjadikan birokrasi tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu. Harus diakui bahwa birokrasi sangat rentan dijadikan alat kepentingan politik. Keberpihakan birokrasi pada satu kekuatan politik tertentu akan menimbulkan kerawanan tersendiri. “Kewajiban” pimpinan kementerian/lembaga/pemda menjadi tim pemenangan pilpres, misalnya, juga berpengaruh cukup signifikan terhadap birokrasi pusat/daerah. Pengalaman empirik menunjukkan bahwa sejak berlangsungnya pemilu (2004) dan pilkada (2005) yang dipilih oleh rakyat, birokrasi pusat/daerah sulit independen secara politik. Bahkan, tak sedikit ditemukan kasus penggunaan fasilitas pemerintah pusat/daerah (Pemda) untuk pemenangan calon tertentu/petahana dalam pemilu/pilkada. Penggunaan anggaran daerah untuk pemenangan calon tertentu pun sulit dihindarkan karena kentalnya politisasi birokrasi. Kongkalikong politik dan birokrasi banyak ditemukan, baik dalam pemilu/pilkada maupun pasca pemilu/pilkada.¹⁹

diakses pada 2 Maret 2019.

¹⁸ Secara sederhana debirokratisasi adalah penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi. Debirokratisasi merupakan upaya untuk menyederhanakan dan merampingkan birokrasi publik agar disfungsi birokrasi dapat dikurangi. “*Debureaucratization or decrease in bureaucratism is the process of removing the monopoly of a few bureaucrat-politicians in the government. This is done by making room for the participation of citizen organizations in the country governance.*”

¹⁹ Redaksi, “Bawaslu Terima 165 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN, Jateng Terbanyak”, <https://news.detik.com/berita/d-4458440/bawaslu-terima-165-laporan-pelanggaran-netralitas-asn-jateng-terbanyak>, diakses pada 20 April 2019.

Setelah dua dekade berlalu, birokrasi Indonesia masih belum terbebas dari model birokrasi patrimonial, yakni sistem birokrasi yang bercirikan *patron-client*, sarat dengan *power culture*, *moral hazard*, dan *safety first philosophy*. Dalam sistem pemilu saat ini, bahkan, netralitas birokrasi sulit tercapai karena banyaknya penetrasi politik ke dalam birokrasi. Sebagai akibatnya, se usai pemilu/pilkada tidak sedikit pejabat yang jabatannya terancam.²⁰ Tidak jarang muncul protes terhadap mutasi yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur.²¹

Sejak era reformasi masalah reformasi birokrasi dan demokrasi di Indonesia telah menjadi isu sentral dan perdebatan publik. Krusialnya isu reformasi birokrasi ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan rakyat yang semakin kuat agar birokrasi menjadi ‘abdi rakyat’. Adalah sulit diingkari bahwa kualitas birokrasi yang buruk menjadi salah satu sumber keterbelakangan Indonesia.²² Selain infrastruktur dan korupsi, birokrasi telah menjadi salah satu penghambat pembangunan.²³

Gambaran tersebut menunjukkan betapa netralitas birokrasi – khususnya dalam memperkuat hak politik pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara dan kesetaraan partai politik – menjadi tantangan utama yang harus mendapat perhatian untuk membangun iklim demokrasi yang lebih sehat. Salah satunya adalah melakukan pemisahan politik dari karir administrasi (*public service*) dalam pemerintahan dan depolitisasi *public service*. Seperti dikatakan Asmerom dan Reis di bawah ini

²⁰ Redaksi, “Ancaman Mutasi Besar-besaran Usai Pilkada Garut,” <https://www.liputan6.com/regional/read/3575778/ancaman-mutasi-besar-besaran-usai-pilkada-garut>, diakses pada 20 April 2019.

²¹ Redaksi, “Komisi ASN minta Anies Kembalikan Jabatan yang Dicotot,” <https://www.liputan6.com/news/read/3602468/komisi-asn-minta-anies-kembalikan-jabatan-yang-dicotot>, diakses pada 20 April 2019.

²² Meskipun pendapatan per kapita penduduk Indonesia tahun 2010 naik menjadi \$ 3.500 dollar, peringkat Indonesia masih berada di bawah Brunei (\$ 51,000), Singapura (\$ 49,700), Malaysia (\$ 13,300), dan Thailand (\$7,900).

²³ Redaksi, “Infrastruktur dan Faktor Legal Masih Hambat Investasi” 30 Maret 2018, <http://www.republika.co.id>, diakses pada 2 Maret 2019.

“Politics and policy are separated from administration; public servants are appointed and promoted on the basis of merit rather than on the basis of party affiliation or contributions; public servants do not engage in partisan political activities; public servants do not express publicly their personal views on government policies or administration; public servants provide forthright and objective advice to their political masters in private and confidence. In return, political executives protect the anonymity of public servants by publicly accepting responsibility for departmental decisions”.²⁴

Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Intensitas relasi juga terjadi saat birokrasi menjalankan programnya dan saat institusi politik melakukan pengawasan. Keseimbangan pola relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh terhadap proses pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa relasi politik dan birokrasi ditandai dengan ciri-ciri seperti praktik lobi untuk mencari posisi/jabatan dan intervensi politik dalam penentuan jabatan dan politik anggaran. Era reformasi menghasilkan politisi yang sangat pragmatis yang acapkali melakukan manuver politik dengan melakukan politisasi birokrasi seperti yang sudah diuraikan sebelumnya.

Relasi birokrasi dan politik sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan kuatnya motif politik dalam birokrasi.²⁵ Birokrasi, bahkan,

bisa dijadikan kekuatan politik karena memiliki jaringan struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang memadai, dan memiliki kewenangan eksekusi program dan anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Penutup

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara *regular* karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, *civil society*, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk *suksesi* kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitnya dan *stakeholders* terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung *constraining* dan tidak *concern* dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi *genuine* masyarakat, kualitas kompetisi, *political equality*, dan peningkatan *political responsiveness*.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita *hoax* membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.

Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan

²⁴ Asmerom, Haile K. dan Elisa P. Reis, 1996, *Democratization and Bureaucratic Neutrality*. London: Macmillan Press, hlm. 22-23.

²⁵ Politisasi birokrasi dalam Pilkada, misalnya, telah mengoyak soliditas birokrasi yang menyebabkan terkotak-kotaknya PNS. Kepala daerah sebagai pembina PNS/birokrasi di daerah memanfaatkan birokrasi sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan politik. Netralitas PNS terganggu dalam pilkada karena mereka menghadapi dilema: mendukung salah, tidak mendukung juga salah. Tidak sedikit pula PNS yang “dinonjobkan” pasca pilkada karena tidak menjadi pendukung kepala daerah. Kepala daerah, misalnya, bisa bertindak bebas terhadap birokrasi. Bahkan, kepala daerah bisa juga “memainkan” birokrasi seperti melakukan mutasi, merekrut dan memasang orang-orang kepercayaan, serta memanfaatkan seluruh instrumen birokrasi untuk kepentingan-kepentingan politik jangka pendek.

semua *stakeholders* terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal *trust building* merupakan suatu keniscayaan dalam proses *deepening democracy*/ konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.

Proses pendalaman demokrasi/konsolidasi demokrasi memerlukan peran penting *stakeholders* terkait pemilu dan juga elemen-elemen kekuatan lainnya seperti *civil society*, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga *survey*. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (*societal forces*) tersebut sangat diperlukan. *Civil society*, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.

Berkenaan dengan hal tersebut semua *stakeholders* terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para *stakeholders* tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial

demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya *public trust* dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidakpercayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Daftar Pustaka

Buku

- Arghiros, Daniel. *Democracy, Development and Decentralization in Provincial Thailand*. Richmond, Surrey, UK: Curzon, 2001.
- Asmerom, Haile K. dan Elisa P. Reis. *Democratization and Bureaucratic Neutrality*. London: Macmillan Press, 1996.
- Aspinall, Edward dan Marcus Mietzner, ed., *Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS, 2010.
- Cassinelli, C.W., *The Politics of Freedom: An Analysis of the Modern Democratic State*. Seattle: University of Washington Press, 1961.
- Dowse, Robert E. dan John A. Hughes. *Political Sociology*. Great Britain: John Wiley & Sons Ltd. Second Edition, 1986.
- Fung, A. dan E. Olin Wright. *Thinking about Empowered Participatory Governance*. London: Verso Press, 2003.
- Kuntjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jembatan, 1983.

- Migdal, Joel S., *Strong Societies and Weak States: State – Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton: Princeton University press, 1988.
- Ramos, Charmaine. *Decentralization and Democratic Deepening in the Philippines*. Manila: Institute for Popular Democracy and LOGOLINK, 2007.
- Reuschemeyer, D., E. et al., *Capitalist Development and Democracy*. UK: Polity Press, 1992.
- Smith, B.C., *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. London: Allen and Unwin, 1985.
- Whitehead, Laurence, “The Consolidation of Fragile Democracies?”, dalam Robert Pastor (ed), *Democracy in the Americas*. New York: New York Holmes, 1989.
- Zuhro, R. Siti dkk. *Model Demokrasi Lokal*. Jakarta: PT THC Mandiri, 2011.

Makalah Seminar

- Zuhro, R. Siti, “Demokrasi: Peluang dan Tantangannya”, makalah yang dipresentasikan dalam Simposium Gurubesar KAHMI yang diselenggarakan MN KAHMI bekerjasama dengan FISIP Universitas Brawijaya, Malang, 23 Maret 2019.

Surat Kabar

- Zuhro, R. Siti, “Politik 2018 dan Pilpres 2019, *Kompas*, 2 Januari 2019
- , “Pilpres Milik Kita”, *Kompas*, 17 April 2019.

Sumber Online

- Abdul Hakim MS, “Sejak Pemilu 1955, Parpol Islam Selalu Kalah Dengan Parpol Nasionalis. Kenapa?”, <http://www.skala survei indonesia.com/parpol-islam-selalu-kalah-dengan-parpol-nasionalis-kenapa/>, diakses pada 2 Maret 2019.
- Fathiyah Wardah, “Hasil Ijtima Ulama II Pastikan Dukungan Bagi Prabowo-Sandiaga”, 14 September 2018, <https://www.voaindonesia.com/a/hasil-ijtima-ulama-ii-pastikan-dukungan-bagi-prabowo-sandiaga/4571457.html>, diakses pada 2 Maret 2019.
- Ine Yulita Sari, “Ini Dia 54 Artis Nyaleg di Pemilu Legislatif 2019”, 21 Juli 2018, <https://www.liputan6.com/pileg/read/3595944/ini-dia-54-artis-nyaleg-di-pemilu-legislatif-2019>, diakses pada 2 Maret 2019.

- Ihsanuddin, “Presiden: Akhir-akhir Ini Banyak Spanduk Jokowi PKI”, 7 Desember 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/07/13292441/presiden-akhir-akhir-ini-banyak-spanduk-jokowi-pki>, diakses pada 2 Maret 2019.
- Muhammad Hafil, “BPN Resmi Laporkan 1.200 Dugaan Kecurangan Pilpres 2019”, 20 April 2019, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/>, diakses pada 22 April 2019.
- Niken Purnamasari, “Wiranto: Ada 53 Kasus Hoax dan 324 Hate Speech Sepanjang 2018”, 25 Oktober 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4272642/>, diakses pada 2 Maret 2019.
- Nur Habibie, “400 Kiai dan Pengurus Pesantren se-Indonesia Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin”, 16 September 2018, <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3644936/400-kiai-dan-pengurus-pesantren-se-indonesia-dukung-jokowi-maruf-amin>, diakses pada 2 Maret 2019.
- Patricia Diah Ayu Saraswati, “Live Report: Kerusuhan 22 Mei Usai Pengumuman Pemilu 2019”, 22 Mei 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522083812-32-397230/live-report-kerusuhan-22-mei-usai-pengumuman-pemilu-2019>, diakses pada 10 Juni 2019.
- Redaksi, “Daftar Caleg dari Kalangan Artis dalam Pemilu 2019, Terbanyak dari Partai Nasdem”, 16 April 2019, <http://jatim.tribunnews.com/2019/04/16/daftar-caleg-dari-kalangan-artis-dalam-pemilu-2019-terbanyak-dari-partai-nasdem>, diakses pada 20 April 2019
- Redaksi, “Camat di Makassar Dukung Jokowi, Gubernur Sulsel: ASN Harus Netral!”, 22 Februari 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4439492/camat-di-makassar-dukung-jokowi-gubernur-sulsel-asn-harus-netral>, diakses pada 2 Maret 2019.
- Redaksi, “Bawaslu: Tren Pelanggaran Pilkada Bukan SARA, tetapi Keterlibatan Pejabat”, 26 Juni 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/26/11363281/bawaslu-tren-pelanggaran-pilkada-bukan-sara-tetapi-keterlibatan-pejabat>, diakses pada 2 Maret 2019
- Redaksi, “Bawaslu Terima 165 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN, Jateng Terbanyak”, <https://news.detik.com/berita/d-4458440/bawaslu-terima-165-laporan-pelanggaran-netralitas-asn-jateng-terbanyak>, diakses pada 20 April 2019.
- Redaksi, “Ancaman Mutasi Besar-besaran Usai Pilkada Garut,” <https://www.liputan6.com/regional/read/3575778/ancaman-mutasi-besar-besaran-usai-pilkada-garut>, diakses pada 20 April 2019.

Redaksi, “Komisi ASN minta Anies Kembalikan Jabatan yang Dicapot,” <https://www.liputan6.com/news/read/3602468/komisi-asn-minta-anies-kembalikan-jabatan-yang-dicapot>, diakses pada 20 April 2019.

Redaksi, “Infrastruktur dan Faktor Legal Masih Hambat Investasi” 30 Maret 2018, <http://www.republika.co.id>, diakses pada 2 Maret 2019.

Redaksi, “TKN Jokowi-Maruf akan Laporkan 14.843 Dugaan Kecurangan yang Untungkan Paslon 02”, 2 Mei 2019, <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/02/tnk-jokowi-maruf-akan-laporkan-14843-dugaan-kecurangan-yang-untungkan-paslon-02>, diakses pada 5 Mei 2019.

TENTANG PENULIS

Efriza

Penulis merupakan dosen tetap program studi ilmu politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), Jakarta. Beberapa tulisannya antara lain: “Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik”, “Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan”, “Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia”. Penulis dapat dihubungi melalui email: efriza.riza@gmail.com

Luky Sandra Amalia

Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI ini adalah sarjana Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya (2005) dan mendapatkan gelar Master of Development Studies dari Murdoch University. Bidang kajian yang diminati adalah mengenai pemilu dan gender. Berbagai tulisan mengenai pemilu dan perempuan dalam politik sudah dihasilkannya baik artikel jurnal maupun *book chapter*. Penulis dapat dihubungi melalui email: sandra_thok@yahoo.com.

Sarah Nuraini Siregar

Sejak tahun 2004 sampai sekarang, penulis menjadi salah satu peneliti di bidang perkembangan politik nasional di Pusat Penelitian Politik-LIPI dengan konsentrasi studi tentang militer dan kepolisian. Menyelesaikan studi di tingkat Sarjana tahun 2002 dan Pasca Sarjana di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2005, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Ia juga aktif sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UI sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beberapa tulisannya antara lain: Problematik Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia:

Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003-2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: nurainisarah30@gmail.com.

Defbry Margiansyah

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Agama dan Politik. Ia menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana di Jurusan Ilmu hubungan Internasional Universitas Pasundan pada tahun 2013 dengan penelitian akhir mengenai Tantangan Masyarakat Islam di Eropa: Analisis Resistensi Kelompok Konservatif kanan terhadap Muslim. Penulis juga merupakan alumnus Global Studies Programme di Institut für Soziologie, Albert-Ludwig-Universität Freiburg, Jerman. Penulis dapat dihubungi melalui email: defbry@yahoo.com

R. Siti Zuhro

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana di bidang Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP Universitas Jember. Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari the Flinders University, Australia dan Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Australia. Sebagai peneliti senior, Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis diantaranya Demokratisasi Lokal; Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Yogyakarta: Ombak, 2009), Demokratisasi Lokal; Peran Aktor dalam Demokratisasi (Yogyakarta: Ombak, 2009); Kisruh Perda: Mengurai Masalah dan Solusinya (Yogyakarta: Ombak, 2010) dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: wiwieqsz@yahoo.com.

Dhuroruddin Mashad

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan bidang kepakaran politik, politik dan pemerintahan, yang lebih berfokus kepada politik di bidang Agama, Asia Selatan, Dunia Islam, dan Minoritas. Penulis mendapatkan Gelar S1 dan S2 dari jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis baik artikel maupun buku terkait pemilu, agama dan politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: dhur001@lipi.go.id

Sutan Sorik

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Nasional di bidang Pemilu. Gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis dapat dihubungi melalui email: sutan.sorik98@gmail.com

